



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CANDRA WIJATMIKO ADI,
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 749297

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 778.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/29 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 283.050.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, LAINNYA Rp. 335.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 489.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, LAINNYA Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1,2 E CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 188.312.558

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.514.362.558

III. HUTANG Rp. 321.000.787



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.193.361.771

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.